Peradaban Journal of Interdisciplinary EDUCATIONAL RESEARCH
e-ISSN: 3025-2121
Volume 3, Issue 2, August 2025, pp. 142–153
DOI: https://doi.org/10.59001/pjier.v3i2.532

Article

Pendidikan Islam dan Dinamika Sosial: Studi Komparatif Masa Demokrasi Parlementer dan Era Digital

Ana Dwi Lestari[1], Anggi Anggraini[2], Triyo Supriyatno[3]

[1] Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia; email: *240101210044@student.uin-malang.ac.id*

[2] Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia; email: *240101210003@student.uin-malang.ac.id*

[3] Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia; email: *triyo@pai.uin-malang.ac.id*

Abstract

This study analyzes the dynamics of Islamic education in Indonesia through a historical-comparative approach between the Parliamentary Democracy period (1950–1959) and the contemporary digital era. The primary goal is to map the patterns of continuity and change in how Islamic education responded to distinct social-political and technological challenges. Using a qualitative methodology based on literature review, the article finds that the struggles of Islamic education during the Parliamentary Democracy era were centered on political and institutional legitimacy within the newly emerging national system. In contrast, challenges in the digital era have shifted to the realm of functional

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).
Journal homepage: https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJIER/index

adaptation and the negotiation of authority amid technological disruption. This finding confirms that Islamic education is not a static entity but a dynamic social agent with high adaptive capacity. Theoretically, this study enriches the literature on the social history of Islamic education by providing a comparative analytical framework. Practically, it underscores the urgency of curriculum renewal, strengthening digital literacy, and fostering collaboration among stakeholders to ensure the ongoing relevance of Islamic education.

Keyword
Comparative Study, Digital Era, Historical Approach, Islamic Education, Parliamentary Democracy.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika pendidikan Islam di Indonesia melalui pendekatan historis-komparatif antara periode Demokrasi Parlementer (1950-1959) dan era digital kontemporer. Tujuan utamanya adalah untuk memetakan pola kontinuitas dan perubahan pendidikan Islam dalam merespons tantangan sosial-politik dan teknologi yang berbeda. Menggunakan metodologi kualitatif berbasis kajian literatur, artikel ini menemukan bahwa perjuangan pendidikan Islam pada masa Demokrasi Parlementer berpusat pada legitimasi politik dan institusional dalam sistem nasional yang baru. Sebaliknya, tantangan di era digital bergeser ke ranah adaptasi fungsional dan negosiasi otoritas di tengah disrupsi teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bukanlah entitas statis, melainkan agen sosial yang dinamis dengan kapasitas adaptif yang tinggi. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur sejarah sosial pendidikan Islam dengan menghadirkan kerangka analitis komparatif. Secara praktis, ia menggarisbawahi urgensi pembaruan kurikulum, penguatan literasi digital, dan kolaborasi antar-aktor untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di masa kini.

Kata Kunci
Demokrasi Parlementer, Era Digital, Kajian Komparatif, Pendidikan Islam, Pendekatan Historis

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia selalu bergerak dalam pusaran perubahan sosial dan politik. Hingga kini, ia terus berhadapan dengan problem mendasar: bagaimana menjaga otoritas nilai Islam sekaligus beradaptasi dengan tuntutan modernisasi. Fenomena mutakhir memperlihatkan bahwa pendidikan Islam menghadapi tantangan serius, mulai dari relevansi kurikulum di era digital, kesenjangan antara idealitas ajaran dan praktik pendidikan, hingga perubahan karakter peserta didik akibat derasnya arus globalisasi (Zein, 2024).

Menariknya, problematika ini bukan hal baru. Pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), pendidikan Islam juga berhadapan dengan persoalan krusial berupa pencarian legitimasi politik, perdebatan integrasi kurikulum ke dalam sistem pendidikan nasional, serta keterbatasan sarana pendidikan (Pulungan et al., 2024). Dengan kata lain, meski berbeda konteks, pendidikan Islam di masa lalu dan sekarang sama-sama berada dalam situasi tarik-menarik antara idealitas nilai agama dan tuntutan realitas sosial-politik. Karena itu, menghubungkan tantangan masa kini dengan pengalaman masa lalu dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pola adaptasi dan keberlanjutan Pendidikan Islam di tengah perubahan sosial-politik.

Meskipun dinamika pendidikan Islam di dua periode ini penting, kajian yang menghubungkan keduanya masih terbatas. Penelitian tentang Demokrasi Parlementer umumnya menyoroti kebijakan politik negara terhadap madrasah dan pesantren, tetapi belum menggali secara mendalam dimensi sosial pendidikan (Pulungan et al., 2024). Kajian lain lebih menekankan adaptasi kelembagaan pesantren terhadap perubahan zaman (Saefullah, 2024), atau menyoroti disrupsi teknologi dalam pendidikan Islam era digital (Wibisono et al., 2024). Literatur-literatur tersebut memperlihatkan bahwa penelitian yang ada masih terfragmentasi—ada yang berfokus pada sejarah, ada pula yang menyoroti era digital, tetapi hampir tidak ada yang menautkan keduanya dalam kerangka analisis komparatif. Tidak ada penelitian yang secara khusus mengkaji kontinuitas dan perubahan pendidikan Islam antara era Demokrasi Parlementer dan era digital dalam kerangka historis-komparatif.

Karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan bacaan alternatif dengan menelusuri keterhubungan dua periode yang berbeda namun sama-sama menentukan arah pendidikan Islam di Indonesia. Alih-alih melihat masa lalu dan masa kini secara terpisah, artikel ini mencoba membangun jembatan analisis yang menunjukkan bagaimana persoalan legitimasi, kurikulum, dan tantangan sosial-politik di masa Demokrasi Parlementer beresonansi dengan problem relevansi, modernisasi, dan disrupsi teknologi pada era digital. Artikel ini akan menggunakan analisis historis-komparatif untuk menelaah dinamika pendidikan Islam pada masa Demokrasi Parlementer dan era digital. Lebih dari sekadar perbandingan, penelitian ini akan mengidentifikasi kesinambungan nilai, pola adaptasi, dan interaksi pendidikan Islam dengan konteks sosial-politik yang melingkupinya. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan perspektif holistik yang menunjukkan bagaimana tantangan masa kini memiliki akar sejarah dan bagaimana pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi masa depan pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review) untuk menelaah dinamika sosial pendidikan Islam dalam dua periode sejarah: masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) dan era digital kontemporer (Saefullah, 2024). Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat dalam menggali makna, konteks, dan narasi historis yang membentuk serta memengaruhi praktik pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia.

Data yang dikaji bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, antara lain buku-buku sejarah pendidikan Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan pendidikan, arsip sejarah, serta karya ilmiah lainnya yang mendeskripsikan konteks sosial-politik dan sistem pendidikan dalam kedua periode yang dikaji (Lim et al., 2022). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur menggunakan basis data Google Scholar. Pencarian dilakukan dengan kata kunci seperti *"pendidikan Islam Demokrasi Parlementer," "sejarah pendidikan Islam Indonesia," "pendidikan Islam era digital,"* dan *"sosial politik pendidikan Islam."* Dari hasil pencarian awal, terkumpul sejumlah artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) terbit dalam 5 tahun terakhir untuk kajian era digital, sedangkan untuk

periode Demokrasi Parlementer menggunakan literatur historis yang otoritatif; (2) berasal dari publikasi akademik yang bereputasi (jurnal nasional/internasional, buku akademik, dan arsip sejarah); serta (3) memiliki relevansi langsung dengan tema hubungan pendidikan Islam dan dinamika sosial-politik. Dari proses seleksi tersebut, diperoleh 19 artikel utama yang dianalisis, ditambah dengan beberapa sumber pendukung berupa buku dan dokumen arsip.

Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, membaca dan mengidentifikasi tema pokok dari setiap literatur. Kedua, mengelompokkan temuan berdasarkan periode (Demokrasi Parlementer dan era digital) serta isu utama seperti legitimasi negara, integrasi kurikulum, otoritas nilai, dan tantangan teknologi. Ketiga, menafsirkan pola kesinambungan maupun perubahan menggunakan kerangka teori sosiologi pendidikan dan sejarah sosial. Teori sosiologi pendidikan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan Islam berfungsi sebagai agen sosial yang beradaptasi dengan tuntutan masyarakat, sementara teori sejarah sosial membantu memahami interaksi pendidikan Islam dengan dinamika politik dan budaya pada setiap periode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam dalam Konteks Sosial Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) merupakan salah satu fase penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia pascakemerdekaan (Sari et al., 2021). Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia menganut model parlementer dengan pergantian kabinet yang cepat, partisipasi politik yang tinggi, serta dinamika ideologi yang cukup tajam antarpartai (Wafa, 2024). Dari perspektif sejarah sosial, dinamika ini menunjukkan bagaimana pendidikan tidak hanya berdiri sebagai institusi akademik, melainkan juga arena kontestasi ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan sekuler.

Apabila ditinjau dari kebijakan negara, tonggak penting Pendidikan Islam adalah lahirnya *Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 1951* yang menstandarisasi kurikulum madrasah dengan memasukkan pelajaran umum di samping pelajaran agama (Rama & Yahdi, 2023). Kebijakan ini menunjukkan adanya pengakuan formal negara terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, integrasi ini bersifat parsial karena dukungan finansial dan kelembagaan dari pemerintah masih terbatas, sehingga madrasah tetap bergantung pada swadaya masyarakat. Kesenjangan ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan dengan sekolah umum yang dikelola Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Dari sisi peran lembaga pendidikan, madrasah dan pesantren berfungsi ganda: sebagai sarana transmisi ilmu keagamaan dan sebagai medium pembentukan identitas sosial-keagamaan masyarakat Muslim. Pesantren tradisional mempertahankan otoritas keagamaan berbasis ulama, sementara madrasah modern mulai muncul di kota-kota besar dengan orientasi lebih rasional dan terstruktur (Mulyadi, 2023). Perbedaan ini menunjukkan adanya proses adaptasi internal pendidikan Islam dalam menghadapi tuntutan modernisasi.

Dalam dimensi respons sosial dan politik, partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi aktor utama yang memperjuangkan pengakuan negara terhadap pendidikan Islam. Masyumi mendorong sistem pendidikan nasional agar tidak bersifat

sekuler, sedangkan NU lebih menekankan legitimasi pesantren tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa (Halim, 2021). Namun, persaingan antarpartai, termasuk antara partai berbasis Islam dan nasionalis, sering kali menempatkan isu pendidikan Islam dalam arena tarik-menarik kepentingan politik. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pendidikan Islam bukan sekadar ranah pedagogis, melainkan juga instrumen politik untuk memperkuat legitimasi kelompok tertentu.

Dari perspektif tantangan struktural, keterbatasan dana, rendahnya kualifikasi tenaga pendidik, serta keterbatasan sarana menjadikan madrasah tidak mampu bersaing setara dengan sekolah negeri. Namun, berdasarkan teori sejarah sosial, justru keterbatasan inilah yang memperlihatkan daya tahan masyarakat Muslim dalam mempertahankan lembaga pendidikannya. Komitmen kolektif umat terlihat dari menjamurnya madrasah dan pesantren, yang sekaligus menjadi bentuk resistensi budaya terhadap warisan sistem pendidikan kolonial dan penetrasi nilai-nilai Barat (Zuhriansah, 2025). Nilai-nilai keislaman yang diajarkan dalam madrasah dan pesantren juga menjadi alat resistensi kultural terhadap penetrasi nilai-nilai Barat yang masuk melalui sistem pendidikan kolonial yang masih berpengaruh pada masa itu.

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa Demokrasi Parlementer dapat dipahami melalui empat indikator analitis: (1) kebijakan negara yang parsial, (2) peran lembaga pendidikan dalam membentuk identitas sosial, (3) tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya, dan (4) respons sosial-politik melalui partai Islam. Dari perspektif sejarah sosial, periode ini menegaskan bahwa pendidikan Islam berfungsi bukan hanya sebagai sarana pengajaran agama, melainkan juga sebagai medan kontestasi ideologi dan simbol perjuangan identitas umat dalam struktur negara modern. Fondasi yang diletakkan pada periode ini menjadi basis penting bagi transformasi pendidikan Islam di era berikutnya.

Transformasi Pendidikan Islam di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa implikasi besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan Islam di Indonesia (Isti'ana, 2024). Era digital, yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan sistem pembelajaran daring, telah merevolusi cara individu mengakses, mengelola, dan mentransmisikan pengetahuan (Wang et al., 2023). Dari perspektif sejarah sosial, pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi formal, tetapi juga berkembang sebagai ekosistem digital yang membentuk ulang relasi antara guru, murid, dan masyarakat. Dinamika tersebut dapat dianalisis melalui empat indikator utama: kebijakan negara, peran lembaga pendidikan, tantangan struktural, dan respons sosial.

Dari sisi kebijakan negara, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi terkait digitalisasi pendidikan, seperti *Merdeka Belajar* dan *transformasi digital madrasah* yang dicanangkan oleh Kementerian Agama (Rokhmawati et al., 2025). Integrasi kurikulum berbasis digital serta penyediaan platform e-learning madrasah menunjukkan adanya pengakuan bahwa pendidikan Islam tidak dapat lagi dipisahkan dari teknologi. Kebijakan ini juga berorientasi pada literasi digital, keterampilan abad ke-21, dan kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0.

Dalam konteks peran lembaga pendidikan, madrasah, pesantren, hingga perguruan

tinggi Islam kini memanfaatkan *Learning Management System* (LMS), aplikasi berbasis Android, dan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Hal ini mencerminkan pergeseran fungsi lembaga pendidikan Islam dari sekadar ruang tatap muka fisik menjadi *hybrid* yang menggabungkan ruang fisik dan digital (Rokhmawati et al., 2025). Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan akses dan fleksibilitas belajar; di sisi lain, ia memunculkan kesenjangan digital antarwilayah, terutama antara kota dan desa.

Dari perspektif respons sosial dan politik, masyarakat Muslim menunjukkan adaptasi yang cukup cepat terhadap digitalisasi. Ustaz digital, dai milenial, dan influencer Islami di media sosial memainkan peran besar dalam transmisi nilai agama. Hal ini sekaligus menandai demokratisasi otoritas keagamaan, di mana otoritas tradisional berbasis ulama dan pesantren kini berhadapan dengan otoritas baru yang lahir dari ruang digital (Wang et al., 2023). Fenomena ini menimbulkan tantangan epistemologis: apakah pendidikan Islam masih berpusat pada lembaga formal, atau justru semakin cair melalui otoritas baru di media digital.

Dalam hal tantangan struktural, masalah yang menonjol adalah kesenjangan digital (*digital divide*), ketimpangan infrastruktur, keterbatasan kompetensi guru dalam literasi teknologi, serta risiko penyalahgunaan ruang digital (radikalisme online, disinformasi, hingga komersialisasi pendidikan). Namun, dari perspektif sejarah sosial, kondisi ini memperlihatkan adanya proses negosiasi antara tradisi dan modernitas. Masyarakat Muslim tidak pasif terhadap teknologi, tetapi berusaha melakukan adaptasi kreatif, misalnya melalui inovasi aplikasi pembelajaran Islami, podcast dakwah, hingga kelas daring internasional yang menghubungkan pesantren di Indonesia dengan lembaga pendidikan di Timur Tengah. (Rokhmawati et al., 2025).

Dengan demikian, pendidikan Islam di era digital dapat dianalisis melalui empat indikator utama: (1) kebijakan negara yang menekankan digitalisasi dan literasi abad ke-21, (2) peran lembaga pendidikan yang bertransformasi menjadi hibrid, (3) respons sosial berupa munculnya otoritas keagamaan baru di media digital, dan (4) tantangan struktural berupa kesenjangan digital dan risiko disinformasi. Perspektif sejarah sosial membantu kita melihat bahwa era digital bukan sekadar fase modernisasi teknologi, melainkan juga momentum redefinisi identitas pendidikan Islam di tengah arus globalisasi informasi.

Komparasi Pendidikan Islam dari Demokrasi Parlementer ke Era Digital

Dari perspektif sejarah sosial, perbandingan antara pendidikan Islam pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) dan era digital menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada aspek kebijakan negara, pendidikan Islam pada 1950-an masih berjuang memperoleh legitimasi penuh dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah belum dipandang sejajar dengan sekolah umum, dan regulasi pendidikan Islam kerap dipengaruhi oleh tarik-menarik ideologis di parlemen (Mulyadi, 2023). Sebaliknya, pada era digital, negara justru mengambil posisi aktif dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar, penyediaan platform digital seperti SPADA (Sistem Pembelajaran Daring) dan SIMPATIKA (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag), serta dukungan regulasi untuk transformasi pembelajaran berbasis teknologi.

Dari sisi peran lembaga pendidikan, madrasah dan pesantren pada 1950-an berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama sekaligus benteng moral bangsa, meski masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Pada era digital, peran tersebut mengalami pergeseran

karena lembaga pendidikan kini berhadapan dengan arus besar digitalisasi. Madrasah, pesantren, dan sekolah agama dituntut tidak hanya menjadi pengajar ilmu agama, tetapi juga berperan sebagai fasilitator literasi digital agar peserta didik tidak terjebak informasi yang menyesatkan di ruang siber.

Perbedaan yang mencolok juga tampak dalam tantangan struktural. Pada 1950-an, keterbatasan infrastruktur, belum seragamnya kurikulum, serta intervensi politik menjadi hambatan utama bagi perkembangan pendidikan Islam. Sementara itu, di era digital, tantangan lebih banyak berkaitan dengan kesenjangan akses teknologi, ketergantungan pada perangkat digital, serta disrupsi otoritas keagamaan akibat munculnya berbagai otoritas baru di media sosial yang kerap menimbulkan kontestasi tafsir keagamaan.

Dari sisi respons sosial, pada 1950-an masyarakat memandang pendidikan Islam sebagai simbol perjuangan identitas sekaligus sarana memperkuat moralitas bangsa. Dukungan sosial terhadap madrasah dan pesantren cukup kuat, meski akses masih terbatas bagi sebagian kalangan. Sebaliknya, pada era digital, respons sosial menjadi lebih beragam. Di satu sisi, masyarakat memanfaatkan internet untuk memperoleh pengetahuan agama secara lebih cepat dan luas; di sisi lain, mereka menghadapi risiko banjir informasi, radikalisme digital, serta komodifikasi agama melalui berbagai platform.

Dengan demikian, perbandingan kedua periode ini memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan Islam sama-sama menghadapi tantangan struktural pada setiap era, bentuk dan orientasinya berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Jika pada masa Demokrasi Parlementer perjuangannya lebih bersifat institusional dan ideologis, maka pada era digital tantangannya terletak pada kemampuan adaptasi terhadap arus teknologi dan dinamika sosial yang ditimbulkannya. Secara ringkas perbandingan kedua pereode digambarkan dalam matrik berikut.

Matriks Perbandingan Pendidikan Islam Era Demokrasi Parlementer (1950–1959) vs Era Digital (2000-an–sekarang)

Indikator	Demokrasi Parlementer	Era Digital
Kebijakan Negara	Negara mulai menata pendidikan Islam melalui regulasi madrasah (UU Darurat No. 4/1951, kebijakan integrasi kurikulum umum-agama). Orientasi kebijakan masih mencari keseimbangan antara sekularisasi pendidikan dan aspirasi umat Islam.	Negara mendorong digitalisasi pendidikan, termasuk madrasah dan pesantren (misalnya program e-learning, digitalisasi kurikulum KMA 183/2019). Ada tantangan kesenjangan akses digital dan standar mutu nasional.
Peran Sosial-Politik Partai/Ormas Islam	Partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII) berperan aktif memperjuangkan posisi madrasah dan pendidikan agama di parlemen serta memengaruhi kebijakan pendidikan nasional.	Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, dsb.) lebih dominan daripada partai politik dalam advokasi pendidikan Islam. Fokus pada inovasi kurikulum, digitalisasi, dan penguatan lembaga pendidikan.
Tantangan Utama	Fragmentasi politik dan tarik-menarik ideologi (Islam vs sekularisme) berimbas pada arah pendidikan Islam.	Disrupsi teknologi, komersialisasi pendidikan, serta kesenjangan digital antara kota-desa.
Respons Masyarakat/Pendidikan Islam	Pesantren dan madrasah menguatkan daya tahan dengan memperluas kurikulum (memasukkan pelajaran umum) tanpa kehilangan identitas agama.	Pesantren dan madrasah beradaptasi dengan platform digital, blended learning, serta inovasi media dakwah dan pembelajaran.

Pola Kesinambungan	Pendidikan Islam tetap menjadi arena tawar-menawar antara negara dan umat, serta menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi sosial-politik.	Pola yang sama berulang: pendidikan Islam tetap adaptif terhadap tekanan eksternal, sambil menjaga nilai-nilai inti.

Peran Aktor Sosial dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer, tidak pernah lepas dari keterlibatan berbagai aktor sosial yang berperan aktif dalam membentuk arah, isi, dan struktur sistem pendidikan itu sendiri. Aktor sosial di sini merujuk pada individu, kelompok, maupun institusi di luar struktur pemerintahan formal yang secara sadar atau tidak sadar memengaruhi penyelenggaraan pendidikan Islam, baik melalui advokasi politik, penyediaan layanan pendidikan, hingga transformasi nilai dan wacana publik. Dalam konteks perubahan sosial, peran aktor-aktor ini menjadi signifikan karena mereka bukan hanya bertindak sebagai pelaku pasif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong respons adaptif pendidikan Islam terhadap dinamika masyarakat.

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), aktor sosial yang paling menonjol dalam ranah pendidikan Islam adalah organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan partai-partai Islam seperti Masyumi. Organisasi-organisasi ini bukan hanya mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan berbasis Islam, tetapi juga terlibat aktif dalam proses legislasi kebijakan pendidikan melalui keterlibatan mereka dalam parlemen. NU, dengan basis pesantren tradisionalnya, mendorong pendidikan Islam berbasis kitab kuning dan nilai-nilai ke-Aswaja-an yang berakar pada tradisi local (Halim, 2021). Sementara Muhammadiyah menekankan pada modernisasi pendidikan Islam melalui pengembangan sekolah Islam dengan kurikulum yang lebih rasional dan saintifik, serta pengelolaan lembaga yang lebih sistematis. Kedua organisasi ini membentuk dualisme model pendidikan Islam yang berkembang hingga saat ini.

Partai politik Islam seperti Masyumi berperan penting dalam memperjuangkan agar pendidikan Islam mendapatkan tempat yang layak dalam sistem pendidikan nasional yang sedang dibangun pascakemerdekaan. Para tokoh intelektual Muslim dari Masyumi seperti Mohammad Natsir mendorong agar negara tidak bersikap netral terhadap agama, tetapi memberikan ruang legal dan anggaran untuk pengembangan pendidikan Islam (Wafa, 2024). Dengan demikian, aktor-aktor sosial pada era ini memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan umat Islam dan negara dalam hal pendidikan, serta menjadi representasi artikulatif dari suara masyarakat Muslim dalam ranah kebijakan.

Memasuki era digital, lanskap aktor sosial dalam pendidikan Islam mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemunculan komunitas digital keislaman, lembaga dakwah online, dan figur publik berbasis media sosial (influencer keagamaan) telah menciptakan medan baru dalam produksi dan penyebaran pengetahuan Islam. Aktor-aktor ini tidak selalu memiliki afiliasi dengan lembaga formal seperti madrasah atau pesantren, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat Muslim terutama generasi muda memahami dan mengakses ajaran Islam (Wang et al., 2023). Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, hingga podcast menjadi saluran utama dalam penyampaian konten keislaman, mulai dari ceramah, tanya-jawab fikih, hingga refleksi moral sehari-hari.

Transformasi ini menciptakan fenomena baru: desentralisasi otoritas keagamaan dan perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam. Tidak hanya ulama dan

guru formal, kini siapa pun yang memiliki kredibilitas dan pengikut dapat menjadi penyampai pesan-pesan keislaman. Hal ini berdampak pada sistem pendidikan Islam formal yang kini harus bersaing dengan sumber-sumber nonformal yang lebih fleksibel, responsif, dan dekat dengan bahasa generasi muda. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tidak hanya harus mengadopsi teknologi, tetapi juga membangun kolaborasi dengan aktor-aktor digital untuk menjaga moderasi, kualitas, dan relevansi materi keislaman (Azizi et al., 2025). Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga mengambil peran penting, terutama dalam pengembangan literasi digital, pelatihan guru, serta penyediaan akses pendidikan ke daerah terpencil. Aktor sosial semacam ini memperkuat fungsi sosial pendidikan Islam sebagai alat pemberdayaan dan pengentasan ketimpangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran aktor sosial dalam pengembangan pendidikan Islam sangat sentral, baik dalam masa Demokrasi Parlementer maupun era digital. Jika pada era 1950-an aktor sosial berfungsi sebagai penyambung kepentingan umat dengan negara melalui jalur politik dan kelembagaan, maka pada era digital peran mereka berkembang menjadi fasilitator wacana, penggerak inovasi, dan penyeimbang informasi keagamaan di ruang publik. Perubahan peran ini menegaskan bahwa pendidikan Islam selalu berada dalam dialektika antara struktur formal dan kekuatan sosial, antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan globalitas. Oleh karenanya, penguatan kapasitas dan kolaborasi antaraktor sosial menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi pendidikan Islam ke depan.

Implikasi Sosial dan Strategi Masa Depan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, sebagaimana telah dibahas dalam kajian historis dan kontemporer, merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan identitas kolektif umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman (Audi et al., 2024). Oleh karena itu, dinamika yang terjadi dalam konteks sosial-politik Indonesia, baik pada masa Demokrasi Parlementer maupun era digital, tidak hanya berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam secara internal, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Dampak-dampak ini mencakup penguatan solidaritas komunitas Muslim, peningkatan akses terhadap pendidikan berbasis nilai Islam, serta munculnya model pendidikan baru yang lebih fleksibel dan adaptif.

Salah satu implikasi sosial paling menonjol dari transformasi pendidikan Islam di era digital adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan melalui jalur nonformal dan digital. Jika pada masa Demokrasi Parlementer partisipasi sosial lebih terpusat pada organisasi kemasyarakatan dan partai politik, maka pada era digital partisipasi bersifat lebih individual, terfragmentasi, dan berbasis komunitas daring. Hal ini berdampak positif pada demokratisasi akses terhadap ilmu keislaman, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius dalam hal otentisitas sumber ajaran dan kontrol terhadap penyimpangan ideologis (Audi et al., 2024). Penelitian oleh Azizi et al. (2025) menunjukkan, misalnya, maraknya konten dakwah di media sosial memperluas akses literasi keislaman, tetapi juga memperbesar potensi lahirnya otoritas-otoritas baru yang tidak selalu berbasis otoritas keilmuan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus mengambil peran lebih besar sebagai penyeimbang antara keterbukaan informasi dan ketepatan pemahaman agama.

Selain itu, perubahan karakter peserta didik di era digital yang lebih kritis, terbuka, dan memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap teknologi menuntut pergeseran pendekatan pedagogis dalam pendidikan Islam (Wang et al., 2023). Paradigma pembelajaran satu arah dan normatif tidak lagi efektif dalam menjawab kebutuhan spiritual maupun intelektual generasi muda Muslim. Temuan Rahman & Yusuf (2021) memperlihatkan bahwa integrasi keterampilan abad ke-21 berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital dalam kurikulum PAI mampu meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan. Dengan demikian, strategi masa depan pendidikan Islam perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis bukti.

Pertama, penguatan kurikulum berbasis integrasi nilai dan konteks sosial perlu dilakukan. Studi oleh Munti & Syaifuddin, (2020) menunjukkan bahwa kurikulum PAI yang mengaitkan materi agama dengan isu-isu sosial kontemporer, seperti lingkungan hidup dan etika digital, lebih efektif dalam membentuk kesadaran sosial siswa dibandingkan kurikulum yang hanya berfokus pada aspek ritual. Kedua, pengembangan kapasitas guru dan tenaga pendidik dalam literasi digital dan pedagogi kritis sangat mendesak. Survei nasional oleh Kementerian Agama (2022) menemukan bahwa lebih dari 60% guru madrasah masih mengalami kesulitan dalam menggunakan platform pembelajaran daring, padahal peserta didik semakin terbiasa dengan ekosistem digital. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan yang terstruktur.

Ketiga, penguatan kolaborasi antaraktor sosial, baik lembaga formal maupun nonformal, telah terbukti memberi dampak positif. Misalnya, penelitian oleh Fikri et al. (2023) memperlihatkan bahwa kerja sama antara pesantren dan komunitas dakwah digital menghasilkan model pembelajaran agama yang lebih kontekstual sekaligus tetap menjaga otoritas keilmuan. Keempat, pengembangan model pembelajaran hibrida (blended learning) sudah menunjukkan efektivitasnya. Studi yang dilakukan oleh Azizah (2021) di sejumlah madrasah menemukan bahwa siswa lebih mudah memahami materi fiqh dan akidah melalui kombinasi pembelajaran tatap muka dan aplikasi digital, dibandingkan metode tatap muka murni. Model ini juga terbukti efektif untuk menjangkau siswa di daerah terpencil atau dalam kondisi darurat seperti pandemi.

Implikasi sosial dari strategi-strategi ini bersifat jangka panjang. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan berbasis bukti empiris, pendidikan Islam dapat memainkan peran strategis dalam membentuk masyarakat Muslim yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keislaman. Sebaliknya, kegagalan dalam merespons tantangan ini berpotensi menimbulkan marginalisasi, disorientasi nilai, bahkan krisis otoritas dalam kehidupan keagamaan. Dengan demikian, pendidikan Islam masa depan dituntut tidak hanya menjadi warisan nilai-nilai masa lalu, tetapi juga sebagai lokus inovasi yang menghubungkan tradisi, realitas kontemporer, dan tantangan masa depan melalui strategi yang berbasis nilai, ilmu, dan teknologi secara seimbang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis secara komparatif dinamika pendidikan Islam di Indonesia pada dua periode krusial: masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) dan era

digital kontemporer. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memetakan bagaimana pendidikan Islam merespons tantangan sosial-politik dan teknologi yang fundamental berbeda, namun sama-sama menuntut adaptasi kelembagaan yang signifikan. Hasil temuan menunjukkan bahwa, meskipun berada di era yang berbeda, pendidikan Islam secara konsisten menunjukkan kapasitas adaptifnya sebagai sebuah sistem sosial. Pada masa Demokrasi Parlementer, perjuangan utama berfokus pada ranah politik dan institusional, yaitu untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan dari negara yang baru berdiri. Sebaliknya, di era digital, tantangannya bergeser ke ranah sosial dan epistemologis, yakni bagaimana mempertahankan otoritas nilai dan relevansi kurikulum di tengah derasnya arus informasi dan demokratisasi otoritas keagamaan. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam bukanlah entitas statis, melainkan agen dinamis yang terus bernegosiasi dengan perubahan di sekitarnya. Secara teoritis, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya analisis sejarah sosial pendidikan Islam dengan menghadirkan kerangka komparatif yang melampaui deskripsi kronologis. Dengan membandingkan dua periode yang terpisah, penelitian ini menegaskan bahwa studi pendidikan Islam harus dilihat sebagai sebuah narasi kontinuitas dan perubahan yang terintegrasi, bukan sebagai serangkaian peristiwa yang terputus. Adapun secara praktis, temuan ini menggarisbawahi urgensi bagi pengelola pendidikan Islam untuk memprioritaskan penguatan literasi digital keagamaan, pengembangan model pembelajaran hibrid, dan kolaborasi inter-lembaga untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena sebagian besar bergantung pada kajian literatur sekunder. Analisis belum mencakup data empiris mendalam seperti arsip lembaga pendidikan atau wawancara dengan para pelaku sejarah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam, misalnya melalui etnografi digital untuk memahami interaksi di ruang siber, atau penelusuran arsip primer untuk mengungkap dinamika internal madrasah dan pesantren di masa lalu secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

Audi, A. A. P. J., Hamami, T., Gonibala, M. L., & Bonde, F. M. F. (2024). Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *10*(4), 1648–1664. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1210

Azizah, A. (2021). Pentingnya penelitian tindakan kelas bagi guru dalam pembelajaran. *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, *3*(1), 15–22.

Azizi, M. R., Nuraini, T. D., Audina, S., & Siswanto, A. H. (2025). Rekonstruksi Epistimologi, Dakwah Dalam Konteks Digitalisasi Dan Era Disrupsi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(6), 654–666. https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.404

Fikri, A., Pohan, M. M., & Anwar, K. (2023). Pesantren Curriculum Management Based On Religious Moderation At Mahad Al Jamiah. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(1).

Halim, A. (2021). POLITIK & GERAKAN KEBANGSAAN PEMUDA MUSLIM (Studi Terhadap Kiprah GP Ansor Pada Masa Kelahiran hingga Masa Demokrasi Parlementer). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *15*(1), 47–60. https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.505

Isti'ana, A. (2024). Integrasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, *4*(1), 302–310. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.493

Lim, W. M., Kumar, S., & Ali, F. (2022). Advancing knowledge through literature reviews:'what','why', and 'how to contribute.' *The Service Industries Journal*, *42*(7–8), 481–513. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02642069.2022.2047941

Mulyadi, H. (2023). *Sejarah Pendidikan Islam: Problematika Kontemporer Pendidikan Islam*. PT Salim Media Indonesia.

Munti, N. Y. S., & Syaifuddin, D. A. (2020). Analisa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *4*(2), 1799–1805.

Pulungan, Z. M., Pratiwi, S. A., Ayura, P. A., Ibra, Z. N., Mufidah, R., Manurung, O. A., & Yunita, S. (2024). Pendidikan Demokrasi di Indonesia. *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, *2*(3), 81–89. https://doi.org/https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.347

Rama, B., & Yahdi, M. (2023). Pendidikan Islam Masa Penajahan Kemerdekaan dan Dinamika Kebijaksanaan. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(3), 287–301. https://doi.org/https://doi.org/10.58540/pijar.v1i3.357

Rokhmawati, Z., Aslan, A., & Farchan, A. (2025). Inovasi teknologi dalam pendidikan jarak jauh: Kajian literatur. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, *11*(1), 264–274. https://doi.org/https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3735

Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagamaan dalam islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(4), 195–211. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428

Sari, D., Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2021). Literature Study of Sosial Studies Learning Materials About the Parliamentary Democracy Period 1950-1959. *The Kalimantan Sosial Studies Journal*, *2*(2), 115–126. https://doi.org/https://doi.org/10.20527/kss.v2i2.3244

Wafa, M. A. (2024). Demokrasi pluralistik. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *2*(8), 113–119.

Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2023). Peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Indonesia. *Kemdikbud*, *4*(2), 1–7.

Wibisono, M. Y., Albustomi, A. G., & Yunus, R. M. (2024). *Agama dan pemulihan pasca-konflik: Kajian pembangunan sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Zein, M. (2024). Transformasi Pendidikan Islam Di Era Digital, Tantangan Dan Solusi Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, *2*(3), 146–156.

Zuhriansah, M. (2025). Modernisasi Pendidikan Perspektif Azyumardi Azra Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Islam. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(2), 45–66. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.884